

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perubahan sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi menjadi suatu fenomena yang umumnya sering terjadi. Tuntutan demokratisasi ini menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas. Kedua aspek tersebut menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintah termasuk di bidang pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan seluruh aktivitas dan kerja keuangan Pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mardiasmo, 2002). Pengamat ekonomi, pengamat politik, investor, hingga rakyat mulai memperhatikan setiap kebijakan dalam pengelolaan keuangan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya UU No.22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No.25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah. Disatu pihak otonomi daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya UU No.22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No.25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah, yang sekarang telah diperbaharui dengan UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah

pusat dan daerah, memberikan harapan baru terhadap tumbuhnya kesadaran untuk membangun daerah secara lebih optimal, tidak lagi terkonsentrasi dipusat. Namun dipihak lain, otonomi daerah menghadirkan kekhawatiran munculnya desentralisasi masalah dan desentralisasi kemiskinan. Artinya pelimpahan masalah dan kemiskinan yang selama ini tidak mampu ditangani dan diselesaikan oleh pemerintah pusat.

Kewajiban pemerintah pusat dalam negara kesatuan untuk menjamin sumber keuangan untuk membiayai otonomi tersebut. Untuk menjamin sumber keuangan bagi daerah otonom, pemerintah harus menjamin perimbangan keuangan pusat dengan daerah. Perimbangan ini dapat ditempuh melalui salah satu dari dua metode berikut: pertama, perimbangan keuangan yang ditempuh dengan cara penetapan persentase tertentu bagi daerah otonom dari jenis penerimaan pusat. Dan metode kedua, perimbangan keuangan yang ditempuh dengan cara pembagian kewenangan mencari sumber pendapatan antar pusat dan daerah otonom (Ulum 2004:51).

Menurut peneliti fenomena yang umumnya sering terjadi yakni sebagian besar pemerintah daerah dibidang keuangan daerah dalam membiayai belanja daerah relatife kecil, sehingga peranan kontribusi penerimaan yang berasal dari Pemerintah pusat (DAU) dalam bentuk sumbangan dan bantuan sangat diharapkan untuk menunjang kemampuan keuangan daerah dalam membiayai belanja daerah yang ada di Kabupaten Pohuwato.

Berlakunya undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, membawa perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintah daerah. UU ini menegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus(DAK), Dan bagian daerah dari bagi hasil pajak pusat. Tujuan dari transfer dana perimbangan kepada pemerintah daerah adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan menjamin Tercapainya standar pelayanan publik. Tabel 1 berikut merupakan laporan realisasi DAU

Tabel 1 LAPORAN REALISASI DANA ALOKASI UMUM

KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2008 S/D 2012

(SATUAN RUPIAH)

U R A I A N	TAHUN 2008	TAHUN 2009	TAHUN 2010	TAHUN 2011	TAHUN 2012
DANA ALOKASI UMUM	219.117.783.000, 00	240.863.606.000, 00	261.037.973.4 00,00	284.600.063.385 ,00	342.707.301. 000,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa laporan realisasi anggaran dana alokasi umum kabupaten Pohuwato dari tahun 2008 hingga 2012 semakin meningkat, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato dalam membiayai pengeluaran daerah masih tergantung pada dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat, sehingga

dana alokasi umum dapat dikatakan menjadi faktor penunjang belanja daerah yang ada di Kabupaten Pohuwato. Tabel 2 berikut merupakan laporan realisasi belanja daerah Kabupaten Pohuwato

**TABEL 2 LAPORAN REALISASI BELANJA DAERAH
KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2008 S/D 2012
(SATUAN RUPIAH)**

U R A I A N	TAHUN 2008	TAHUN 2009	TAHUN 2010	TAHUN 1011	TAHUN 2012
BELANJA LANGSUNG	254.385.180.45 2,00	229.260.851.92 3,00	204.440.033 .570,00	235.140.830.8 89,00	213.368.495. 034,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG	127.590.015.63 0,00	174.308.479.27 2,47	213.917.549 .238,00	246.205.964.9 30,00	278.396.683. 435,00
Jumlah	381.975.196.08 2,00	408.569.331.19 5,47	418.357.582 .808,00	481.346.795.8 19,00	491.765.178. 469,00

Sumber : Badan Pengelolaan dan Aset Daerah

Berdasarkan tabel diatas masalah yang terjadi di daerah kabupaten Pohuwato dari tahun 2008 sampai 2012 ini masih bergantung pada pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum untuk melengkapi kekurangan belanja daerah, hal ini menggambarkan bahwa, masih minimnya keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, sehingga tidak mandiri dalam menyelenggarakan belanja daerah, olehnya sampai pada saat ini dana alokasi umum menjadi sumber pendapatan yang utama di kabupaten Pohuwato, maka masalah yang dihadapi dikabupaten Pohuwato tidak maksimalnya dalam mengelola potensi sumber daya alam dalam meningkatkan keuangan daerah.

Harapan peneliti pemerintah daerah kabupaten pohuwato harus mengacu pada regulasi UU no 33 tahun 2004 terkait dengan desentralisasi

keuangan daerah atau otonomisasi daerah, dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten pohuwato harus mandiri dalam melaksanakan belanja daerah, yang bersumber dari keuangan daerahnya atau pendapatan asli daerah, sehingga dana alokasi umum yang dimaksud tidak serta merta dijadikan sebagai sumber pendapatan yang utama di kabupaten Pohuwato, tapi dijadikan sebagai pelengkap untuk mengisi sebagian kecil kekurangan di daerahnya.

Selain itu yang menjadi harapan pemerintah pusat dana transfer tersebut dapat digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan penggunaan dana tersebut sudah seharusnya pula dilakukan secara transparan dan akuntabel. Adanya dana transfer tersebut berimplikasi pada APBD, yaitu pada pos penerimaan, sebagai konsekuensinya adalah bertambah besarnya jumlah penerimaan daerah. Perubahan jumlah penerimaan daerah yang cukup besar tersebut harus diikuti dengan pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif dan disertai dengan peningkatan Sumber Daya Manusia. UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dapat memberikan spirit bagi pemerintah daerah untuk memberdayakan sumber ekonomi yang ada secara mandiri, ekonomis, efisien, dan efektif.

Olehnya berdasarkan dari pernyataan di atas maka peneliti lebih tertarik melakukan penelitian di kabupaten pohuwato dengan judul. **“Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah Pada Kabupaten pohuwato”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas teridentifikasi masalah di Kabupaten Pohuwato yaitu : sebagian besar pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah yang ada di Kabupaten Pohuwato relative kecil, sehingga Dengan kata lain peranan /kontribusi penerimaan yang berasal dari Pemerintah pusat (DAU) dalam bentuk sumbangan dan bantuan sangat diharapkan untuk menunjang kemampuan keuangan daerah dalam membiayai belanja daerah yang ada di Kabupaten Pohuwato.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah“ apakah terdapat pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap alokasi belanja daerah di Kabupaten Pohuwato dari tahun 2008-2012 ?”

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap alokasi belanja daerah di Kabupaten Pohuwato dari tahun 2008-2012.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat teoritis

1. Sebagai bahan referensi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan akuntansi khususnya akuntansi publik, disamping itu hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan referensi untuk penelitian lebih lanjut oleh peneliti berikutnya
2. Untuk peneliti : sebagai pembuktian teori-teori yang diperoleh dari bangku kuliah.

1.5.2. Manfaat praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam rangka untuk lebih meningkatkan kinerjanya, serta dapat memberikan informasi bagi masyarakat kab Pohuwato tentang Pengaruh DAU Terhadap Belanja Daerah

